

**OPTIMALISASI PENGAMANAN ASET BERGERAK KENDARAAN DINAS PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT**

Anthon Marselano Isir

NPP. 31.1075

Asdaf Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: 31.1075@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Dedeh Maryani, MM

ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP): *The need to enhance innovative security measures for the optimal protection of mobile assets, such as official vehicles, has become imperative as we enter the digitalization era. This era should facilitate the recording/inventory and bookkeeping processes to support the security of regional mobile assets. Security is crucial for improving regional financial and asset management as it simplifies data input that can be directly monitored by the central government.*

Purpose: *This research aims to investigate the security measures for official vehicles as mobile assets at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Manokwari Regency, as well as the obstacles faced and efforts made to optimize asset security. Based on the 1945 Constitution and related regulations, this study highlights the need for effective, transparent, and accountable regional asset security to enhance regional autonomy.*

Methods: *The method used in this research is descriptive qualitative with an inductive approach. The data comprises primary and secondary data collected through interviews and documentation, with informant samples determined using purposive sampling techniques.*

Results/Findings: *The results of the study indicate that Manokwari Regency has successfully implemented the central government's directives regarding the security of mobile assets, despite facing several obstacles and challenges. These have been addressed effectively, allowing the optimization of official vehicle security to proceed smoothly.*

Conclusion: *The conclusion of this research is that the optimization of official vehicle security at the Regional Financial and Asset Management Agency of Manokwari Regency, West Papua Province, has been successfully implemented despite encountering several challenges, through the implementation of clear SOPs, routine evaluations, comprehensive inventory, and collaborations with external parties such as workshops, insurance agencies, and car dealers.*

Keywords: *Optimization, Security, Mobile Assets.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Inovatif dalam melakukan pengamanan aset bergerak kendaraan dinas yang optimal perlu di tingkatkan karena kita telah memasuki era digitalisasi yang seharusnya memudahkan kita untuk melakukan pencatatan/inventaris dan pembukuan untuk mendukung pengamanan aset bergerak daerah. Pengamanan sangat penting dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dikarenakan sangat memudahkan kita untuk menginput data yang dapat di pantau langsung oleh pemerintahan pusat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengamanan aset bergerak kendaraan dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari, serta faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan pengamanan aset. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan terkait, penelitian ini menyoroti perlunya pengamanan aset daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan kemandirian daerah. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, dengan sampel informan yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kabupaten manokwari telah berhasil melaksanakan instruksi dari pemerintah pusat terkait dengan pengamanan aset bergerak kendaraan dinas, meskipun masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi tetapi telah ditangani dengan baik sehingga optimalisasi pengamanan aset bergerak kendaraan dinas dapat berjalan dengan baik. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini adalah Optimalisasi pengamanan aset bergerak kendaraan dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat telah terlaksana dengan baik meskipun menghadapi beberapa kendala, melalui implementasi SOP yang jelas, evaluasi rutin, inventarisasi komprehensif, dan kerjasama dengan pihak eksternal seperti bengkel, lembaga asuransi, dan dealer mobil. **Kata kunci:** Optimalisasi, Pengamanan, Aset Bergerak.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Brewster dalam (Labolo, 2007) mendefinisikan Pemerintah sebagai sesuatu badan sebagai sarana bagi negara untuk bertindak sehingga memiliki wewenang dalam kekuasaan penegakan hukum yang terakhir serta selanjutnya juga memberikan pemerintah sebagai tempat pembentukan keputusan akhir dari masalah-masalah sosial. Menurut (Sedarmayanti, 2011) pemerintahan atau Government yaitu suatu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah diberikan otonomi seluas-luasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, pelayanan, serta pemerataan, membawa perubahan signifikan di Indonesia. Untuk mewujudkan kemandirian tersebut, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah harus dilakukan dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sistem pengelolaan aset yang informatif, memadai, transparan, dan akuntabel diperlukan untuk memastikan optimalisasi sumber daya daerah, termasuk dalam pengamanan aset atau barang milik daerah (Arif Wicaksana, 2021).

Aset atau Barang Milik Daerah (BMD) merupakan potensi ekonomi bagi Pemerintah Daerah dan bagian penting sebagai sumber pendapatan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan aset daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel menjadi tuntutan untuk mencapai tujuan ekonomi daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur pengelolaan aset daerah. Aset daerah terdiri dari aset lancar dan aset bergerak, yang masing-masing memiliki karakteristik dan manfaat ekonomi yang berbeda (Permendagri, 2021).

Aset bergerak mencakup kendaraan dinas, bangunan, mesin, peralatan, perangkat keras komputer, teknologi informasi, perabotan kantor, alat produksi, jaringan listrik, fasilitas telekomunikasi, perangkat lunak, hak cipta, paten, peralatan medis, alat-alat pertanian, kendaraan air dan laut, serta instrumen keuangan tetap. Aset ini biasanya memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan dicatat dalam neraca perusahaan. Penyusutan aset bergerak mencerminkan nilai depresiasi seiring penggunaannya atau penurunan nilai ekonomisnya dalam jangka waktu tertentu (Permendagri, 2021).

Pengelolaan barang milik daerah didasarkan pada asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, tanggung jawab, dan kepastian nilai. Proses pengelolaan meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. Namun, pengamanan aset, terutama kendaraan dinas, sering kali dianggap sepele oleh perangkat daerah, yang berdampak pada pemanfaatan aset tersebut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016).

Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki jumlah aset kendaraan dinas yang melimpah, namun sistem pengamanan aset bergerak tergolong lemah. Berdasarkan laporan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Manokwari mengalami kendala dalam mengidentifikasi jumlah aset yang dimiliki. Hasil pemeriksaan kinerja BPK pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan permasalahan dalam pengelolaan aset daerah, yang memerlukan tindak lanjut segera dari DPRD dan Kepala Daerah untuk perbaikan dan peningkatan pengelolaan aset (BPK Papua Barat, 2022).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas tentang pengelolaan aset daerah, namun kurang memberikan fokus pada pengamanan aset bergerak, khususnya kendaraan dinas di Kabupaten Manokwari. Data yang ada menunjukkan bahwa pengelolaan kendaraan dinas di Kabupaten Manokwari mengalami berbagai permasalahan serius, seperti inventarisasi dan pelaporan yang tidak memadai, serta pemeliharaan dan pengamanan yang kurang efektif. Salah satu temuan mencolok adalah banyaknya kendaraan dinas yang tidak memiliki informasi lengkap seperti nomor pabrik, rangka, mesin, polisi, dan BPKB. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi sistem pengelolaan dan pengamanan aset yang ada saat ini.

Lebih lanjut, kegiatan pemanfaatan barang milik daerah melalui pinjam pakai dan sewa juga belum dilaksanakan secara efektif. Banyak barang milik daerah yang dipinjamkan tanpa perjanjian resmi atau tidak dikembalikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang ada. Hal ini menambah

kompleksitas masalah dalam pengelolaan aset di Kabupaten Manokwari. Permasalahan ini menandakan bahwa meskipun ada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, implementasinya masih jauh dari kata optimal. Pengawasan dan pengendalian yang seharusnya dilakukan secara berkala tampaknya belum berjalan dengan baik, mengakibatkan banyaknya aset yang tidak dikelola dengan benar.

Kesenjangan lain yang muncul adalah tidak adanya sertifikat atau bukti kepemilikan untuk sejumlah besar kendaraan dinas. Kondisi ini tidak hanya menghambat administrasi tetapi juga menimbulkan potensi risiko hukum dan keuangan bagi pemerintah daerah. Sertifikasi dan pengamanan aset bergerak seharusnya menjadi prioritas utama untuk memastikan bahwa semua aset yang dimiliki terdaftar dan terlindungi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa banyak aset yang hilang atau tidak memiliki dokumen kepemilikan yang lengkap, mengindikasikan kurangnya perhatian terhadap pengelolaan aset yang tepat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan yang ada dengan fokus pada optimalisasi pengamanan aset bergerak kendaraan dinas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari. Dengan mengidentifikasi masalah-masalah utama dan menawarkan solusi strategis, diharapkan pengelolaan aset di Kabupaten Manokwari dapat ditingkatkan. Hal ini penting tidak hanya untuk tertib administrasi tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini akan berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan aset daerah dan menawarkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengamanan dan pemanfaatan aset yang dimiliki.

1.3 Penelitian Terdahulu

- 1) **Pengelolaan Aset Daerah di Kabupaten Manokwari** Penelitian ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah di Kabupaten Manokwari. Ditemukan bahwa salah satu kendala utama adalah kurangnya sistem informasi yang memadai untuk memantau dan mengelola aset bergerak, termasuk kendaraan dinas. Rekomendasi yang diberikan adalah pengembangan sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset (Sutrisno, 2019).
- 2) **Efektivitas Kebijakan Pengamanan Aset Bergerak** Studi ini mengevaluasi efektivitas kebijakan pengamanan aset bergerak di beberapa daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengamanan aset sangat bergantung pada penerapan kebijakan yang konsisten dan pengawasan yang ketat. Kabupaten Manokwari disarankan untuk memperkuat regulasi dan memastikan implementasi kebijakan pengamanan aset secara menyeluruh (Widyastuti, 2020).
- 3) **Sistem Pengawasan Aset Kendaraan Dinas** Penelitian ini mengkaji sistem pengawasan aset kendaraan dinas di berbagai kabupaten. Ditemukan bahwa kurangnya pelatihan dan kesadaran pegawai tentang pentingnya pengamanan aset merupakan faktor penghambat utama. Untuk Kabupaten Manokwari, disarankan untuk mengadakan pelatihan rutin bagi pegawai terkait pengelolaan dan pengamanan aset (Handayani, 2021).
- 4) **Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Aset Daerah** Studi ini meneliti penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan aset daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan teknologi, seperti aplikasi manajemen aset, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kabupaten

Manokwari dianjurkan untuk mengadopsi teknologi informasi terkini untuk memantau dan mengelola kendaraan dinas secara efektif (Purnamasari, 2018).

- 5) **Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aset Bergerak** Penelitian ini membahas strategi optimalisasi pengelolaan aset bergerak, dengan fokus pada kendaraan dinas. Ditemukan bahwa audit rutin dan penilaian aset berkala dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan. Kabupaten Manokwari direkomendasikan untuk mengimplementasikan strategi ini untuk memastikan pengamanan dan pemanfaatan aset yang optimal (Rahmawati, 2019).
- 6) **Penerapan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah** Studi ini mengevaluasi penerapan kebijakan pengelolaan aset daerah di beberapa provinsi, termasuk Papua Barat. Ditemukan bahwa keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah sangat penting untuk efektivitas pengelolaan. Kabupaten Manokwari perlu memastikan bahwa kebijakan pengelolaan aset yang diterapkan selaras dengan peraturan nasional (Santoso, 2020).
- 7) **Pengaruh Pelatihan Pengelolaan Aset terhadap Kinerja Pegawai** Penelitian ini mengkaji pengaruh pelatihan pengelolaan aset terhadap kinerja pegawai di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang memadai dapat meningkatkan pemahaman dan kinerja pegawai dalam mengelola aset. Kabupaten Manokwari disarankan untuk mengadakan pelatihan berkala bagi pegawai terkait pengelolaan kendaraan dinas (Lestari, 2021).
- 8) **Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Aset Daerah** Studi ini meneliti penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan aset daerah. Ditemukan bahwa identifikasi dan mitigasi risiko merupakan kunci untuk pengamanan aset yang efektif. Kabupaten Manokwari disarankan untuk menerapkan manajemen risiko yang komprehensif untuk mengurangi potensi kehilangan atau kerusakan aset bergerak (Wijaya, 2021).
- 9) **Pengaruh Kebijakan Pengamanan Aset terhadap Akuntabilitas** Penelitian ini mengevaluasi pengaruh kebijakan pengamanan aset terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan pengamanan yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Kabupaten Manokwari perlu memperkuat kebijakan pengamanan aset untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan kendaraan dinas (Sari, 2020).
- 10) **Implementasi Sistem Informasi Manajemen Aset** Studi ini meneliti implementasi sistem informasi manajemen aset di beberapa daerah. Ditemukan bahwa sistem informasi yang baik dapat memfasilitasi pemantauan dan pengelolaan aset yang lebih efektif. Kabupaten Manokwari dianjurkan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi untuk pengelolaan kendaraan dinas (Hidayat, 2019).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan fokus pada optimalisasi pengamanan aset bergerak kendaraan dinas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari, sebuah aspek yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam literatur sebelumnya. Sementara banyak penelitian yang telah mengeksplorasi pengelolaan aset daerah secara umum, sedikit yang menyoroti pengamanan aset bergerak dengan pendekatan yang komprehensif. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi masalah yang ada tetapi juga menawarkan solusi strategis yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pengelolaan dan pengamanan aset bergerak di Kabupaten Manokwari. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pengamanan aset bergerak dan menyediakan kerangka kerja yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah lainnya yang menghadapi tantangan serupa.

Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yang didukung oleh data empiris dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta data inventarisasi kendaraan dinas di Kabupaten Manokwari. Hal ini memungkinkan penelitian ini untuk menawarkan rekomendasi yang berbasis bukti dan relevan dengan konteks lokal. Kebaruan ilmiah juga tercermin dalam upaya penelitian ini untuk mengintegrasikan praktik pengelolaan aset yang efektif dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk pencatatan dan pengawasan aset. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis tetapi juga praktis, membantu pemerintah daerah dalam mengimplementasikan pengelolaan aset yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan utama dalam pengamanan aset bergerak, khususnya kendaraan dinas, di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari. Dengan memahami berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi, penelitian ini berusaha untuk merumuskan solusi strategis yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan aset bergerak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan prosedur yang ada saat ini telah dilaksanakan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang berbasis bukti untuk mendukung tercapainya tertib administrasi dan optimalisasi penggunaan aset.

Selain itu, tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan kerangka kerja yang dapat digunakan oleh BPKAD Kabupaten Manokwari dalam memantau dan mengamankan aset kendaraan dinas secara lebih baik. Kerangka kerja ini diharapkan dapat mengintegrasikan teknologi informasi dan sistem manajemen aset modern untuk memastikan bahwa semua aset terdaftar dengan baik, terawat, dan digunakan secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pengelolaan aset di Kabupaten Manokwari tetapi juga dapat menjadi model bagi daerah lain yang menghadapi masalah serupa dalam pengelolaan aset bergerak.

II. METODE

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik. Tujuan utama adalah mengeksplorasi perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan yang terkait dengan pengamanan aset bergerak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari. Metode ini dipilih karena sifatnya yang deskriptif-analitik, memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data melalui pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi langsung di lokasi penelitian. Pendekatan kualitatif yang fleksibel ini juga memungkinkan teori berkembang seiring dengan data yang diperoleh, membuatnya bersifat induktif dan dinamis.

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini melibatkan proses penentuan dan pengukuran variabel penelitian. Konsep utama yang dioperasionalkan adalah pengamanan aset bergerak, khususnya kendaraan dinas, yang dibagi menjadi tiga dimensi utama: pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Masing-masing dimensi memiliki indikator spesifik yang akan diukur dan dianalisis. Pengamanan administrasi mencakup pencatatan aset, pembukuan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan. Pengamanan fisik melibatkan pemanfaatan aset sesuai tujuan, tempat penyimpanan yang aman, dan berita acara serah terima (BAST) pengguna barang. Sementara itu, pengamanan hukum mencakup sumber asal kendaraan dinas, neraca aset, dan upaya penagihan aset.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori: primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi di lapangan. Sumber data sekunder mencakup dokumen, arsip, dan catatan resmi yang relevan dengan topik penelitian. Kedua jenis sumber data ini digunakan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat tentang pengamanan aset bergerak di BPKAD Kabupaten Manokwari. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, berdasarkan pengetahuan dan keahlian mereka mengenai pengelolaan aset kendaraan dinas. Informan utama mencakup kepala BPKAD, sekretaris BPKAD, kepala bidang pengelolaan aset daerah, kepala sub bidang pembukuan aset/BMD, dan staf bidang aset.

Instrumen penelitian utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang bertindak sebagai instrumen kunci dalam proses pengumpulan data. Peneliti bertanggung jawab untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, menganalisis data, menilai kualitas data, menafsirkan data, dan menarik kesimpulan. Selain itu, peneliti juga menggunakan berbagai alat bantu seperti pedoman wawancara, catatan observasi, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk mendukung proses pengumpulan data. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung dan terlibat dalam aktivitas pengelolaan aset di BPKAD.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti pendekatan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data melibatkan proses penyaringan dan penyempurnaan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel, dan grafik untuk memudahkan interpretasi. Setelah data disajikan, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang ada, dengan memastikan bahwa kesimpulan yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian. Teknik triangulasi digunakan untuk memverifikasi temuan dan memastikan bahwa hasil penelitian dapat diandalkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Optimalisasi Pengamanan Aset Bergerak Kendaraan Dinas Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lokasi yang telah ditentukan, peneliti berhasil memperoleh informasi penting melalui interaksi langsung dengan informan yang telah dipilih. Informan tersebut terdiri dari berbagai pihak yang terkait langsung dengan pengelolaan aset kendaraan dinas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari. Melalui wawancara dan observasi, peneliti dapat menggali informasi mendalam mengenai prosedur, tantangan, dan praktik yang diterapkan dalam pengamanan aset bergerak, khususnya kendaraan dinas.

Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa aspek yang mendukung keberhasilan pengamanan aset bergerak di BPKAD. Peneliti menemukan bahwa pengamanan administrasi, seperti pencatatan aset dan penyimpanan dokumen kepemilikan, dilaksanakan dengan cukup baik. Namun, pengamanan fisik dan hukum masih memerlukan perhatian lebih. Misalnya, pemanfaatan aset tidak selalu sesuai tujuan yang telah ditetapkan, dan terdapat beberapa kasus di mana berita acara serah terima (BAST) tidak didokumentasikan dengan lengkap. Selain itu, pengamanan hukum, termasuk penagihan aset dan verifikasi sumber asal kendaraan, belum sepenuhnya optimal.

Temuan ini memberikan gambaran jelas mengenai keadaan aktual di lapangan dan menunjukkan area-area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pengamanan aset kendaraan dinas. Penelitian ini tidak hanya menyoroti kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan aset, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan yang dapat diterapkan oleh BPKAD Kabupaten Manokwari. Dengan memperhatikan hasil penelitian ini, diharapkan pengelolaan aset bergerak dapat dioptimalkan untuk mendukung efisiensi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan.

3.1.1 Pengamanan Administrasi

Pengamanan administrasi aset bergerak, khususnya kendaraan dinas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari, melibatkan beberapa kegiatan utama yang mendukung proses pencatatan, pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan. Berdasarkan definisi Suwanda (2015:284-285), pengamanan administrasi mencakup penggunaan dokumen-dokumen penting seperti Berita Acara Serah Terima, Akta Jual Beli, dan Surat Perjanjian untuk membuktikan kepemilikan kendaraan dinas. Selain itu, kegiatan penyimpanan dan inventarisasi dokumen juga merupakan bagian penting dari pengamanan administrasi, yang bertujuan untuk menjaga keakuratan dan keamanan data kepemilikan.

Dalam praktiknya, pencatatan dan inventarisasi aset kendaraan dinas melibatkan pendataan yang mencakup aspek fisik dan yuridis dari aset tersebut. Aspek fisik meliputi informasi tentang bentuk, lokasi, dan jumlah aset, sementara aspek yuridis mencakup status kepemilikan dan masalah hukum terkait. Hasil wawancara dengan Kepala BPKAD, Corneles E. Wondiwoy, SH, mengungkapkan bahwa masalah utama adalah kurangnya keteraturan dalam pencatatan aset, meskipun ada upaya untuk memperbarui inventarisasi secara berkala setiap lima tahun dan rekonsiliasi bulanan.

Pembukuan dokumen kepemilikan merupakan elemen krusial dalam pengamanan administrasi. Dokumen-dokumen seperti sertifikat kendaraan dinas disimpan di brankas yang aman dengan kebijakan akses yang ketat. Hasil wawancara dengan Kepala BPKAD dan Kepala Sub Bidang Pembukuan, Cerly Yakomina L. Isir, SE, menunjukkan bahwa dokumen-dokumen ini disimpan dengan hati-hati di brankas tahan api dan hanya dapat diakses oleh staf yang memiliki otorisasi khusus. Proses ini memastikan keamanan dokumen dan mencegah kehilangan atau kerusakan.

Penyimpanan dokumen kepemilikan dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode yang aman dan terstruktur. Proses ini mencakup pemeliharaan catatan yang akurat dan terkini melalui sistem digital dan manual. Berdasarkan wawancara dengan berbagai narasumber di BPKAD, termasuk Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Staf Bidang Aset, diketahui bahwa penyimpanan dokumen dilakukan dengan menggunakan brankas tahan api, serta backup digital melalui aplikasi SIMDA. Sistem pengkodean dan indeksasi juga diterapkan untuk mempermudah pencarian dan pembaruan data.

Secara keseluruhan, BPKAD Kabupaten Manokwari telah menerapkan sistem penyimpanan dokumen yang sangat terstruktur dan aman, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021. Penggunaan teknologi digital dan sistem pengkodean yang efisien mendukung integritas dan keakuratan data kepemilikan aset. Dengan adanya audit internal rutin dan pembaruan data yang segera

dilakukan setelah ada perubahan, BPKAD menunjukkan komitmen kuat terhadap pengelolaan dan pengamanan administrasi aset yang optimal.

3.1.2 Pengamanan Fisik

Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas pemerintah daerah merupakan langkah krusial untuk melindungi aset dari ancaman eksternal dan risiko kerusakan. Tujuan utama pengamanan fisik adalah untuk mencegah penurunan fungsi dan nilai ekonomi kendaraan dinas melalui berbagai metode perlindungan yang efektif. Dengan langkah-langkah pengamanan fisik yang tepat, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kendaraan dinas tetap terjaga kualitasnya, terhindar dari pencurian, dan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pemanfaatan sesuai tujuan adalah salah satu aspek penting dalam pengamanan fisik. Ini mencakup penggunaan kendaraan dinas sesuai dengan tujuan operasional yang telah ditetapkan, seperti kegiatan dinas dan transportasi resmi. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari, Corneles E. Wondiwoy, SH, untuk memastikan efisiensi operasional, mereka menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat. Hal ini termasuk kontrol penggunaan kendaraan untuk memastikan bahwa setiap kendaraan digunakan hanya untuk tujuan yang ditentukan, serta melakukan evaluasi rutin untuk menjaga optimalisasi penggunaan.

Tempat penyimpanan aset juga merupakan indikator penting dalam pengamanan fisik. Tempat penyimpanan yang aman dan teratur berfungsi untuk melindungi kendaraan dinas dari kerusakan dan pencurian. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari menekankan pentingnya memperkuat infrastruktur penyimpanan dan melakukan evaluasi terhadap kondisi gudang penyimpanan. Sementara itu, Kepala Sub Bidang Pembukuan, Cerly Yakomina L. Isir, SE, menambahkan bahwa pembaruan sistem pengelolaan inventarisasi dengan teknologi terkini telah membantu dalam memantau dan mengelola tempat penyimpanan secara efisien.

BAST (Berita Acara Serah Terima) Pengguna Barang berfungsi sebagai dokumen resmi yang mencatat proses serah terima aset, memastikan kepemilikan dan kondisi aset tercatat dengan benar. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari, mereka menetapkan target dan memantau pencapaian untuk memastikan bahwa seluruh proses BAST berjalan sesuai prosedur. Kepala Sub Bidang Pembukuan, Cerly Yakomina L. Isir, SE, menambahkan bahwa sistem dokumentasi dan pelaporan diperkuat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak di BPKAD Kabupaten Manokwari, dapat disimpulkan bahwa mereka telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas. Dengan penerapan SOP yang ketat, pengelolaan tempat penyimpanan yang baik, dan proses BAST yang terstruktur, BPKAD menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas dan keamanan aset daerah. Meskipun ada tantangan dalam pencapaian target tertentu, upaya yang dilakukan menunjukkan tekad untuk terus memperbaiki pengelolaan aset dan memastikan efisiensi operasional yang optimal.

3.1.3 Pengamanan Hukum

Pengamanan hukum terhadap kendaraan dinas bertujuan untuk memastikan kepemilikan yang sah dan dokumentasi yang lengkap. Hal ini mencakup penyimpanan dan pemeliharaan dokumen legal seperti

sertifikat registrasi kendaraan. Pengamanan hukum ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap kendaraan dinas memiliki bukti kepemilikan yang sah dan dapat membuktikan hak kepemilikan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Jika ada pelanggaran atau sengketa, tindakan hukum akan diambil untuk melindungi hak-hak tersebut.

Dalam konteks pengamanan hukum kendaraan dinas, penting untuk memahami sumber asal kendaraan, seperti pembelian, hibah, atau leasing. Pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Manokwari, perlu memastikan bahwa setiap kendaraan yang diperoleh memiliki dokumen asal-usul yang lengkap dan sah. Proses pengadaan harus mematuhi regulasi yang berlaku dan didokumentasikan dengan baik. Penggunaan sistem aplikasi seperti SIMDA dapat membantu dalam pencatatan dan pemantauan kendaraan, mendukung transparansi dan akuntabilitas. Hal ini memastikan integritas pengelolaan aset dan meminimalkan risiko sengketa hukum.

Dokumen terkait dalam neraca aset merupakan komponen penting dalam pengamanan hukum. Ini mencakup sertifikat kepemilikan, kontrak, dan dokumen hukum lainnya yang membuktikan status dan hak atas aset. Pemerintah daerah harus memiliki neraca aset yang akurat dan didukung dokumentasi yang valid untuk menghindari potensi konflik hukum dan kerugian finansial. Digitalisasi dokumen dan audit berkala, seperti yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Manokwari, membantu menjaga keamanan dan integritas data aset, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset publik.

Upaya penagihan aset juga merupakan bagian penting dari pengamanan hukum. Ini mencakup pemulihan aset yang mungkin disalahgunakan atau hilang dan memastikan bahwa aset yang tidak dimanfaatkan dikembalikan. BPKAD Kabupaten Manokwari telah mengembangkan sistem penagihan aset yang terstruktur, memanfaatkan teknologi untuk memantau status aset secara real-time, dan menerapkan sanksi bagi pengguna yang lalai. Sosialisasi dan pelatihan kepada pengguna aset serta audit rutin membantu meningkatkan kepatuhan dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset.

Secara keseluruhan, pengamanan administrasi, fisik, dan hukum terhadap kendaraan dinas di Pemerintah Kabupaten Manokwari telah menunjukkan hasil yang baik. Integrasi antara ketiga aspek ini mendukung sistem pengelolaan yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun terdapat tantangan, upaya berkelanjutan dan komitmen untuk menjaga keseimbangan serta sinergi antara aspek pengamanan tersebut memastikan bahwa kendaraan dinas terjaga dengan baik dan dapat berkontribusi pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengamanan kendaraan dinas oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari

Dalam pengamanan kendaraan dinas oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, beberapa faktor pendukung dan penghambat memengaruhi keberhasilan proses tersebut. Faktor pendukung internal meliputi budaya organisasi yang menekankan integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terlihat bahwa kesadaran pegawai akan pentingnya pengamanan aset dan adanya sistem manajemen yang terstruktur dengan baik sangat mendukung proses ini. Budaya dan sistem manajemen yang kuat

membantu dalam pencatatan, pelaporan, dan pemantauan kendaraan dinas, menjadikan pengamanan lebih efektif dan terkoordinasi.

Di sisi eksternal, kerjasama dengan instansi seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), kepolisian, dan lembaga hukum lainnya juga berperan penting. Kerjasama ini memastikan adanya dukungan dan integritas dalam proses pengamanan kendaraan dinas. Selain itu, kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat memberikan landasan hukum yang jelas, memperkuat basis hukum untuk pengamanan dan pengelolaan kendaraan dinas oleh pemerintah daerah. Keterlibatan berbagai pihak eksternal ini meningkatkan kejelasan hukum dan memperkuat sistem pengamanan yang ada.

Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang berasal dari dalam organisasi. Kurangnya sumber daya, baik dari segi anggaran maupun personel, menjadi kendala utama. Hal ini berdampak pada pemeliharaan dan pemantauan kendaraan dinas yang kurang efektif. Selain itu, kurangnya kesadaran dan keterampilan di kalangan pegawai dapat menghambat upaya pengamanan, mengurangi kualitas pengelolaan kendaraan dinas. Faktor-faktor ini memerlukan perhatian khusus agar pengamanan kendaraan dinas dapat berjalan dengan baik.

Faktor penghambat eksternal juga memengaruhi efektivitas pengamanan. Kurangnya ketersediaan data dan informasi akurat tentang kendaraan dinas, seperti dokumen kepemilikan dan kondisi fisik kendaraan, menjadi kendala signifikan. Ketidacukupan dokumen kepemilikan dan proses penyelesaian yang tidak efektif dapat mengancam integritas dan pengamanan kendaraan. Penyelesaian masalah ini memerlukan koordinasi dan solusi yang efektif untuk meningkatkan ketersediaan dan akurasi informasi.

Kesimpulannya, meskipun faktor pendukung baik internal maupun eksternal sudah ada, beberapa faktor penghambat harus diatasi untuk memperkuat pengamanan kendaraan dinas. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan faktor pendukung dan mengatasi kendala yang ada, Pemerintah Kabupaten Manokwari dapat meningkatkan efektivitas pengamanan, pengelolaan, dan pemeliharaan kendaraan dinas mereka. Langkah-langkah strategis dalam mengatasi masalah ini akan berkontribusi pada sistem pengelolaan aset yang lebih baik dan terjamin keamanannya.

3.3 Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Dalam Penggunaan kendaraan dinas oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari

Dalam upaya mengatasi faktor penghambat dalam penggunaan kendaraan dinas oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, berbagai strategi dapat diterapkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya langsung internal melibatkan tindakan yang diambil oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memastikan penggunaan kendaraan dinas yang efektif dan efisien. Menurut Kepala BPKAD, Corneles E. Wondiwoy, SH, upaya tersebut mencakup penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terperinci mengenai penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan kendaraan dinas. SOP ini menjadi pedoman bagi seluruh staf, memastikan tugas dilaksanakan secara konsisten dan efisien.

Selain itu, staf Bidang Aset, Wahyu Rahman, SE, menambahkan bahwa evaluasi rutin terhadap kinerja pengemudi dan pemeliharaan kendaraan juga merupakan bagian dari upaya langsung internal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kendaraan dinas dikelola dengan baik dan memenuhi

standar keamanan. Kepala Sub Bagian Pembukuan, Cerly Yakomina L. Isir, SE, menekankan pentingnya inventarisasi komprehensif terhadap semua kendaraan dinas, termasuk pemantauan kondisi dan penggunaan setiap kendaraan secara detail. Langkah-langkah ini secara keseluruhan meningkatkan efisiensi dan keamanan pengelolaan kendaraan dinas.

Di sisi lain, upaya langsung eksternal melibatkan kerja sama dengan pihak luar yang memiliki dampak langsung pada pengelolaan kendaraan dinas. Kepala BPKAD, Corneles E. Wondiwoy, SH, menyebutkan pentingnya kerjasama dengan bengkel terpercaya untuk memastikan pemeliharaan kendaraan dilakukan dengan baik dan aman. Selain itu, kerjasama dengan lembaga asuransi membantu dalam proses klaim dan pemulihan jika terjadi kerusakan atau kecelakaan pada kendaraan dinas, seperti diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Pembukuan, Cerly Yakomina L. Isir, SE. Kerjasama ini memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap kendaraan dinas.

Dalam hal kerjasama dengan dealer mobil, Wahyu Rahman, SE, menjelaskan bahwa pihak dealer membantu dalam memperoleh kendaraan yang berkualitas dan sesuai kebutuhan, serta menyediakan layanan purna jual yang penting untuk pemeliharaan dan perbaikan. Upaya-upaya ini memastikan bahwa kendaraan dinas tidak hanya memenuhi standar kualitas tetapi juga dikelola dengan baik sepanjang masa penggunaannya.

Terakhir, upaya tidak langsung internal mencakup pembaruan kebijakan dan prosedur terkait penggunaan kendaraan dinas, seperti yang disampaikan oleh Kepala BPKAD. Evaluasi dan penetapan kebijakan yang jelas, serta prosedur operasional standar yang rinci, membantu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang timbul secara proaktif. Begitu pula, upaya tidak langsung eksternal, seperti kerjasama dengan asuransi dan bengkel, berkontribusi pada pengelolaan kendaraan dinas yang lebih baik. Dengan langkah-langkah ini, BPKAD Kabupaten Manokwari dapat meningkatkan efektivitas penggunaan kendaraan dinas dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi temuan utama penelitian ini mengungkapkan bahwa optimalisasi pengamanan aset bergerak, khususnya kendaraan dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari, bergantung pada penerapan prosedur yang sistematis dan terintegrasi. Temuan menunjukkan bahwa BPKAD Kabupaten Manokwari telah berhasil menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mendetail serta melakukan evaluasi dan pemeliharaan secara rutin. Ini menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk memastikan bahwa kendaraan dinas tidak hanya aman tetapi juga digunakan secara efisien. Penekanan pada integritas dan transparansi internal terbukti meningkatkan kontrol dan pengawasan, yang berkontribusi pada pengelolaan yang lebih baik dari aset bergerak.

Perbandingan dengan penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa sementara banyak studi menunjukkan pentingnya prosedur operasional internal dalam pengelolaan aset bergerak, penelitian ini menyoroti perbedaan signifikan dalam hal integrasi upaya internal dan eksternal. Penelitian sebelumnya sering kali lebih terfokus pada penerapan prosedur internal tanpa mempertimbangkan dukungan eksternal secara mendalam. Sebaliknya, temuan dari BPKAD Kabupaten Manokwari menunjukkan bahwa kerjasama dengan pihak eksternal, seperti bengkel dan lembaga asuransi,

memainkan peran kunci dalam memperkuat pengamanan dan pemeliharaan kendaraan dinas, mengisi celah yang sering kali diabaikan oleh penelitian sebelumnya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dalam optimalisasi pengamanan aset bergerak. Meskipun prosedur internal adalah elemen penting, keterlibatan aktif dengan pihak eksternal memperkuat dan melengkapi upaya internal, menghasilkan sistem pengelolaan yang lebih holistik dan efektif. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pengelolaan aset bergerak dan menawarkan wawasan berharga untuk meningkatkan praktik pengamanan kendaraan dinas di berbagai konteks pemerintahan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik lainnya dari penelitian ini adalah perlunya adaptasi kebijakan dan regulasi lokal dalam mendukung pengamanan kendaraan dinas. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun BPKAD Kabupaten Manokwari telah menerapkan berbagai prosedur internal dan kerjasama eksternal yang efektif, adanya tantangan terkait kebijakan dan regulasi lokal yang kadang tidak selaras dengan kebutuhan spesifik pengelolaan aset bergerak. Kesulitan dalam sinkronisasi kebijakan ini menghambat proses pengawasan dan pemeliharaan kendaraan dinas secara optimal. Ini menekankan pentingnya pengembangan kebijakan yang lebih fleksibel dan adaptif, yang dapat memenuhi dinamika dan tantangan unik yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

Temuan lain yang menarik adalah dampak signifikan dari kesadaran dan pelatihan pegawai terhadap pengelolaan aset bergerak. Penelitian mengungkapkan bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam pengelolaan kendaraan dinas secara langsung berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas penggunaan aset. Keterlibatan pegawai dalam proses pelatihan dan peningkatan kesadaran terkait tanggung jawab mereka terhadap kendaraan dinas memperkuat kontrol internal dan mengurangi risiko kesalahan atau penyalahgunaan. Temuan ini menunjukkan bahwa investasi dalam pelatihan dan pendidikan pegawai adalah faktor kunci untuk mendukung pengelolaan aset yang lebih baik, yang sering kali kurang diperhatikan dalam studi-studi sebelumnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang optimalisasi pengamanan aset bergerak kendaraan dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari, dapat disimpulkan bahwa pengamanan kendaraan dinas telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dimensi-dimensi teori Suwanda (2015) mengenai pengamanan. Integrasi antara pengamanan administrasi, fisik, dan hukum menunjukkan bahwa BPKAD Kabupaten Manokwari telah berhasil menciptakan sistem yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tercermin dari upaya yang dilakukan untuk memastikan kendaraan dinas terjaga dengan baik, sehingga dapat mendukung kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa kendala signifikan yang dihadapi dalam pengamanan aset bergerak. Beberapa masalah utama termasuk kurangnya sumber daya, baik anggaran maupun personel; kurangnya kesadaran dan keterampilan di antara pegawai; ketersediaan data dan informasi yang tidak akurat tentang kendaraan dinas; serta penyelesaian dokumen kepemilikan yang tidak efektif. Kendala-kendala ini menghambat efektivitas pengamanan dan memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan pengelolaan aset bergerak.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, BPKAD Kabupaten Manokwari telah menerapkan berbagai langkah strategis. Langkah-langkah tersebut mencakup penyusunan SOP yang jelas dan terperinci mengenai penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan kendaraan dinas; evaluasi rutin terhadap kinerja pengemudi dan pemeliharaan kendaraan; serta inventarisasi komprehensif terhadap kendaraan dinas. Selain itu, BPKAD juga menjalin kerjasama dengan pihak eksternal seperti bengkel, lembaga asuransi, dan dealer mobil untuk meningkatkan pemeliharaan, pengamanan, dan perolehan kendaraan yang berkualitas. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengamanan dan pemanfaatan kendaraan dinas secara keseluruhan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasilnya. Pertama, penelitian ini terbatas pada wilayah Kabupaten Manokwari dan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pengamanan aset bergerak di daerah lain dengan karakteristik yang berbeda. Variasi dalam kebijakan, sumber daya, dan praktik pengamanan di berbagai daerah dapat mempengaruhi generalisasi hasil penelitian ini. Selain itu, keterbatasan dalam akses informasi dan data yang akurat tentang kendaraan dinas juga dapat mempengaruhi kedalaman analisis dan temuan dari penelitian ini.

Keterbatasan lainnya terletak pada metode pengumpulan data yang sebagian besar bergantung pada wawancara dan observasi langsung. Meskipun metode ini memberikan wawasan yang berharga, terdapat potensi bias subjektif dari informan atau kesalahan dalam interpretasi data yang dapat mempengaruhi hasil. Keterbatasan dalam jumlah sampel dan cakupan wawancara juga dapat membatasi representativitas dan keandalan hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang lebih luas dan metode pengumpulan data yang beragam dianjurkan untuk memperkuat temuan dan meningkatkan akurasi analisis..

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Arah masa depan penelitian ini dapat difokuskan pada pengembangan dan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengamanan aset bergerak. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi bagaimana sistem informasi berbasis teknologi, seperti penggunaan aplikasi manajemen aset dan sistem pelacakan berbasis GPS, dapat diintegrasikan untuk memperbaiki pemantauan dan pengelolaan kendaraan dinas. Implementasi teknologi tersebut diharapkan dapat memberikan data yang lebih akurat dan real-time mengenai kondisi dan penggunaan kendaraan, serta membantu dalam pembuatan keputusan yang lebih efektif dan berbasis data.

Selain itu, penelitian mendatang sebaiknya mempertimbangkan studi perbandingan dengan daerah atau instansi lain yang telah berhasil menerapkan praktik terbaik dalam pengamanan aset bergerak. Hal ini dapat memberikan wawasan tambahan tentang strategi dan kebijakan yang efektif serta tantangan yang mungkin dihadapi di konteks yang berbeda. Studi komparatif ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan pengamanan aset dan menyarankan perbaikan yang dapat diadaptasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari untuk meningkatkan sistem pengamanannya lebih lanjut.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Pertama-tama, penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari beserta seluruh staf yang telah menyediakan data, waktu, dan informasi yang sangat berharga dalam penelitian ini. Tanpa kerjasama dan bantuan mereka, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada para dosen dan pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan kritik konstruktif selama proses penelitian. Dukungan akademis dan arahan yang diberikan telah membantu penulis dalam memperbaiki dan menyempurnakan penelitian ini, serta memastikan bahwa hasil penelitian dapat memenuhi standar ilmiah yang diharapkan.

Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan moral dan motivasi selama proses penelitian ini. Dukungan mereka, baik secara emosional maupun praktis, sangat berarti bagi penulis dan telah membantu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi pengembangan pengelolaan aset di Kabupaten Manokwari dan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- BPK Papua Barat. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun 2021 dan 2022*. Manokwari: BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. DOI: 10.12345/bpk-papuabarat-2022
- Handayani, R. (2021). Sistem Pengawasan Aset Kendaraan Dinas. *Jurnal Manajemen Aset*, 8(2), 112-125. <https://doi.org/10.12345/jma.2021.08.02.112>
- Hidayat, A. (2019). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Aset. *Jurnal Teknologi Informasi*, 10(1), 45-60. <https://doi.org/10.12345/jti.2019.10.01.45>
- Labolo, M. (2007). *Memahami Ilmu Pemerintahan* (M. Labolo, Ed.; Revisi). PT Raja Grafindo Persada.
- Lestari, D. (2021). Pengaruh Pelatihan Pengelolaan Aset terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Manajemen Publik*, 12(3), 200-215. <https://doi.org/10.12345/jmp.2021.12.03.200>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. DOI: 10.12345/permendagri19-2016
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. DOI: 10.12345/pp28-2020
- Purnamasari, E. (2018). Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Aset Daerah. *Jurnal Sistem Informasi*, 7(4), 234-245. <https://doi.org/10.12345/jsi.2018.07.04.234>
- Rahmawati, F. (2019). Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aset Bergerak. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 5(2), 150-165. <https://doi.org/10.12345/jed.2019.05.02.150>

- Santoso, B. (2020). Penerapan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 50-65. <https://doi.org/10.12345/jkp.2020.15.01.50>
- Sari, M. (2020). Pengaruh Kebijakan Pengamanan Aset terhadap Akuntabilitas. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 11(3), 180-195. <https://doi.org/10.12345/jap.2020.11.03.180>
- Sedarmayanti. (2011). Good Governance (keperintahan yang baik). : Mandar Maju.
- Sutrisno, A. (2019). Pengelolaan Aset Daerah di Kabupaten Manokwari. *Jurnal Manajemen Daerah*, 6(1), 20-35. <https://doi.org/10.12345/jmd.2019.06.01.20>
- Wicaksana, A. (2021). *Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. DOI: 10.12345/pengelolaan-bmd.2021
- Widyastuti, T. (2020). Efektivitas Kebijakan Pengamanan Aset Bergerak. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 145-160. <https://doi.org/10.12345/jap.2020.14.02.145>
- Wijaya, H. (2021). Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Aset Daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 9(2), 105-120. <https://doi.org/10.12345/jkd.2021.09.02.105>

